



BAPENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA

**PENAGIHAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN
2025**

Disiapkan Oleh:

PPTK

Selaku Kabid. Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah
H. Giri Agung Lubiantoro, SE, M.Si



ardyka1003@gmail.com



KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

| | | |
|---------------------|---|---|
| Urusan | : | 5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan |
| Bidan Urusan | : | 5.02 Keuangan |
| Unit Organisasi | : | 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah |
| Sub Unit Organisasi | : | Bidang Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah |
| Program | : | 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Kegiatan | : | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| Lokasi Kegiatan | : | Kota Bontang |
| Anggaran | : | Rp. 372.596.040,00 |

Bidang Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun 2025

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bapenda mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan fungsi dimaksud, dalam program kerja yang direncanakan pada tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Bapenda tahun 2021-2026 adalah mengintensifkan upaya penagihan pajak kepada para wajib pajak, kegiatan ini merupakan salah satu penjabaran strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat atas kewajiban pajak yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan intensifikasi penagihan ini diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan nilai piutang pajak dan pada sasaran utamanya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Agenda penagihan ini mencakup seluruh sektor pajak daerah baik yang bersifat official maupun self assesment.

Adapun teknis pelaksanaan dalam kegiatan penagihan pajak daerah dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Rapat-rapat koordinasi:

- proyeksi kinerja perencanaan piutang pajak daerah;
- komponen data untuk identifikasi dan pemutakhiran subyek & obyek pajak daerah berkala;
- pelaporan dan pembayaran kepatuhan wajib pajak daerah;
- komponen kualitas pelayanan wajib pajak daerah terkait administrasi perpajakan daerah;
- komponen pemeriksaan dan penagihan secara ruti dan aktif penagihan pajak daerah;
- komponen data porporasi karcis dan retribusi daerah bersama OPD terkait;
- rapat prosedur penetapan penagihan piutang pajak daerah;
- Sosialisasi E-Kitiran PBB, Penyampaian SPPT PBB, Sosialisasi Validasi Data PBB dari UGM, & Pajak Kendaraan Bermotor dari Samsat Bontang
- rapat terkait penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Opsen Pajak.

- b) kegiatan lapangan:
 - melaksanakan penagihan bersama instansi internal dan eksternal;
 - melaksanakan penagihan daluwarsa pajak daerah;
 - pelaksana tim koordinasi optimalisasi penagihan pajak daerah;
 - melaksanakan validasi data & penjaringan sistem pemungutan official & self assessment pajak daerah.
- c) koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota lain dalam rangka penagihan pajak daerah.
- d) penyediaan sarana kendaraan kelapangan penunjang kegiatan penagihan pajak daerah.
- e) Penyampaian jasa pelayanan umum kitiran PBB.
- f) Dukungan Optimalisasi Opsen PKB & Opsen BBNKB.

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk Pasal 9 ayat (9) dasar pengenaan PKB dan Pasal 14 dasar pengenaan BBNKB;
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah;
- 5) Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dimaksudkan untuk memastikan bahwa kewajiban pembayaran pajak oleh warga, masyarakat atau badan usaha di daerah dapat dipenuhi sesuai ketentuan, secara keseluruhan pajak mencakup pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

b. Tujuan

- 1) memberikan gambaran memadai mengenai posisi pajak daerah berasal dari tunggakan wajib pajak;
- 2) tersedianya data kontribusi pajak berdasarkan nilai penerimaan;
- 3) tersedianya data jumlah objek pajak berdasarkan kelompok nilai pajak;
- 4) tersedianya data piutang pajak daerah untuk katagori piutang yang masih bisa ditagihkan;
- 5) tersedianya data tervalidasi dan penghapusan pajak daerah katagori piutang yang kadaluarsa dan tidak dapat ditagihkan;
- 6) tersedianya data pengelompokkan berdasarkan wajib pajak atau objek pajak yang memiliki tingkat kepatuhan.
- 7) Tersedianya data kriteria dan strategi penagihan pajak daerah.
- 8) Tersedianya skema tarif dan perhitungan PKB dan BBNKB beserta Opsen

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang llingkup kegiatan penagihan pajak daerah adalah pelaksanaan kegiatan dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1) Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara sistematis dengan metode pertemuan yang berbentuk rapat, aktivitas lapangan, sosialisasi, edukasi, koordinasi, konfirmasi dan penyampaian serta validasi dan penjaringan pajak daerah berdasarkan sistem pemungutan official dan self assessment pajak daerah.

2) Tahapan Pelaksanaan

1. kegiatan rapat-rapat akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Kegiatan ini melibatkan OPD internal dan eksternal yang terkait dengan materi rapat;
2. aktivitas lapangan dilaksanakan berdasarkan sistem pemungutan wajib pajak dan objek pajak (official & self assessment), penagihan pajak, piutang pajak yang aktif dan kadaluarsa pajak daerah serta sosialisasi, edukasi dan literasi pajak daerah;

3. Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau undangan.
4. Koordinasi dan monitoring pelaksanaan penyampaian kitiran PBB di kelurahan dan Ketua Rukun Tetangga (RT).
5. Kegiatan Opsen PKB dan Opsen BBNKB di wilayah Kota Bontang Bersama Bapenda Provinsi & SAMSAT Bontang.

C. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan penagihan dalam bentuk pelaksanaan rapat-rapat dan aktivitas lapangan yang terdokumentasi dalam bentuk laporan tahun 2025.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUGJAWAB KEGIATAN

1) Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang diketahui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang.

2) Penanggung Jawab

Peanggung jawab sub kegiatan adalah kepala bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah .

3) Penerima Manfaat

Penerima pemanfaat dari sub kegiatan penagihan pajak daerah adalah semua pihak baik dari OPD terkait maupun tidak terkait dan masyarakat Bontang dalam pembangunan dan pelayanan publik.

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1) Waktu Pelaksanaan Kegiatan

- a) Pelaksanaan rapat-rapat direncanakan pada bulan Januari s/d Desember tahun 2025 pada hari kerja dan/atau waktu yang ditetapkan.
- b) Pelaksanaan aktivitas dilapangan direncanakan pada bulan Januari s/d Desember 2025 pada hari kerja dan/atau waktu yang ditetapkan.
- c) Koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas direncanakan pada bulan Maret s/d Juni tahun 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

- d) Koordinasi dan monitoring direncanakan pada bulan Januari s/d November tahun 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran,
- e) Kegiatan Opsen PKB dan Opsen BBNKB direncanakan pada bulan Januari s/d Desember tahun 2025.

2) Matrik Jadwal dan Angkas pelaksanaan kegiatan (terlampir)

F. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bontang.

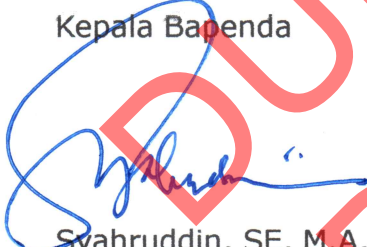
G. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah sebesar Rp. 372.596.040,00 (Rincian terlampir) melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

H. PENUTUP

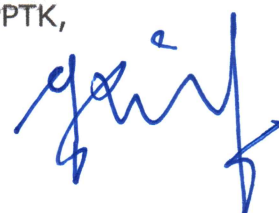
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengetahui,
Kepala Bapenda



Syahrudin, SE, M.A, M.Eng
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197402102005021001

Bontang, 02 Januari 2025
PPTK,



H. Giri Agung Lubiantoro, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197509122000121003

JADWAL KEGIATAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

| URAIAN | JAN | | | | | FEB | | | | | MAR | | | | | APR | | | | | MEI | | | | | JUN | | | | | JUL | | | | | AGS | | | | | SEP | | | | | OKT | | | | | NOV | | | | | DES | | | | |
|--|---|----|-----|----|---|-----|----|-----|----|---|-----|----|-----|----|---|-----|----|-----|----|---|-----|----|-----|----|---|-----|----|-----|----|---|-----|----|-----|----|---|-----|----|-----|----|---|-----|----|-----|----|---|-----|----|-----|----|---|-----|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|
| | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | | | | | | | | | | |
| Sub kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rapat-rapat koordinasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Proyeksi Kinerja Perencanaan Piutang Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. | Komponen Data identifikasi dan pemutakhiran subyek & obyek pajak daerah berkala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. | Pelaporan dan pembayaran kepatuhan wajib pajak daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. | Komponen Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Daerah terkait administrasi perpajakan daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e. | Komponen pemeriksaan dan penagihan secara rutin dan aktif penagihan pajak daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f. | Komponen data porporasi karcis dan retribusi daerah bersama OPD terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g. | Rapat Prosedur Penetapan penagihan piutang pajak daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h. | 1. Sosialisasi E-Kitiran PBB 2. Penyampaian SPPT PBB 3. Sosialisasi Validasi Data PBB dari UGM 4. Pajak Kendaraan Bermotor dari Samsat Bontang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| j. | Rapat terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Opsen Pajak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kegiatan lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Penagihan Bersama instansi internal dan eksternal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. | Tim Koordinasi Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. | Penagihan deluwarasa Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. | Validasi Data & Penjarangan Official & Self Assessment Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e. | Kegiatan Opsen PKB dan BBNKB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ANGGARAN KAS BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

| No | Nama Kegiatan | Pagu | | | | | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|--|---|-----------|------------|------------|-----|-------------|-----|---------|------------|-----|------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-------------|-----|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Jmlh | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Air Mineral Spesifikasi : 330 ml | 30 | Dus | 60.868 | 0% | 1.826.040 | | 913.020 | | | 913.020 | | | | | | | |
| 2 | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur | 350 | Orang/kali | 24.000 | 0% | 8.400.000 | | | 2.400.000 | | 2.400.000 | | | 3.600.000 | | | | |
| 3 | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timu | 350 | Orang/kali | 43.000 | 0% | 15.050.000 | | | 4.300.000 | | 4.300.000 | | | 6.450.000 | | | | |
| 4 | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur | 250 | Orang/kali | 24.000 | 0% | 6.000.000 | | | 2.400.000 | | 3.600.000 | | | | | | | |
| 5 | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timu | 250 | Orang/kali | 43.000 | 0% | 10.750.000 | | | 4.300.000 | | 6.450.000 | | | | | | | |
| 6 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 35.000 | Lembar | 7.500 | 0% | 262.500.000 | | | | | | | | | | | 262.500.000 | |
| 7 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian | 5 | Orang | 3.567.000 | 0% | 17.835.000 | | | 10.701.000 | | 7.134.000 | | | | | | | |
| 8 | Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian | 5 | Orang | 10.047.000 | 0% | 50.235.000 | | | 30.141.000 | | 20.094.000 | | | | | | | |

RENCANA ANGGARAN KAS SIPD-RI TAHUN ANGGARAN 2025

| RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2025 | | | | FORMUIR RAK BELANJA | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------|------------------------|---------|------------|-------------|-----|------------|--------------|-----|------------|-------------|-------------|-----|
| Urusan | : 5 - Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan | : 5.02 - Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| SKPD | : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Unit SKPD | : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Program | : 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan | : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Nilai Anggaran | : Rp. 372.596.040 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Tahun Ini | Total RAK | Semester I | | | | | | Semester II | | | | | |
| | | | | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | |
| | | | | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | Rp 372.596.040 | Rp 372.596.040 | 0 | 913.020 | 54.242.000 | 0 | 0 | 44.891.020 | 0 | 0 | 10.050.000 | 0 | 262.500.000 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 372.596.040 | Rp 372.596.040 | 0 | 913.020 | 54.242.000 | 0 | 0 | 44.891.020 | 0 | 0 | 10.050.000 | 0 | 262.500.000 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp 42.026.040 | Rp 42.026.040 | 0 | 913.020 | 13.400.000 | 0 | 0 | 10.963.020 | 0 | 0 | 10.050.000 | 0 | 0 | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp 42.026.040 | Rp 42.026.040 | 0 | 913.020 | 13.400.000 | 0 | 0 | 10.963.020 | 0 | 0 | 10.050.000 | 0 | 0 | |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | Rp 1.826.040 | Rp 1.826.040 | | 913.020 | | | | 913.020 | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp 23.450.000 | Rp 23.450.000 | | | 6.700.000 | | | 6.700.000 | | | 10.050.000 | | | |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Rp 16.750.000 | Rp 16.750.000 | | | 6.700.000 | | | 10.050.000 | | | | | | |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Rp 262.500.000 | Rp 262.500.000 | | | | | | | | | | | 262.500.000 | |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp 68.070.000 | Rp 68.070.000 | | | 40.842.000 | | | 27.228.000 | | | | | | |
| JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN | | Rp 372.596.040 | Rp 372.596.040 | 0 | 913.020 | 54.242.000 | 0 | 0 | 44.891.020 | 0 | 0 | 10.050.000 | 0 | 262.500.000 | |
| JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN | | | | 55.155.020 | | | 44.891.020 | | | 10.050.000 | | | 262.500.000 | | |
| JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER | | | | 100.046.040 | | | | | | 272.550.000 | | | | | |

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| | |
|---------------------|---|
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 5.02 KEUANGAN |
| Unit Organisasi | : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |
| Kegiatan | : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 372.596.040,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 50.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|-----------------|---|--------------------|
| Capaian Program | Persentase Capaian PAD | 100 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 372.596.040,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 1 Dokumen |
| Hasil | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 100 Persen |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| | |
|-----------------------|---|
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|-------------------|--------|-------|-----|-----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp. 372.596.040,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 372.596.040,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 372.596.040,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 42.026.040,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 42.026.040,00 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | | Rp. 1.826.040,00 |
| | [#] Belanja Natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.826.040,00 |
| | [-] Natura | | | | | Rp. 1.826.040,00 |

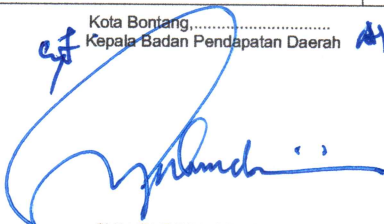
**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----|---------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Air Mineral Spesifikasi : 330 ml | 30 | Dus | 60.868,00 | 0 % | Rp. 1.826.040,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 23.450.000,00 |
| | [#] Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 23.450.000,00 |
| | [-] Kudapan/Snack | | | | | Rp. 8.400.000,00 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur | 350 | Orang / Kali | 24.000,00 | 0 % | Rp. 8.400.000,00 |
| | [-] Makan | | | | | Rp. 15.050.000,00 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur | 350 | Orang / Kali | 43.000,00 | 0 % | Rp. 15.050.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp. 16.750.000,00 |
| | [#] Belanja Konsumsi Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 10.750.000,00 |
| | [-] Konsumsi Aktivitas Lapangan | | | | | Rp. 10.750.000,00 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur | 250 | Orang / Kali | 43.000,00 | 0 % | Rp. 10.750.000,00 |
| | [#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 6.000.000,00 |
| | [-] Kudapan/Snack | | | | | Rp. 6.000.000,00 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur | 250 | Orang / Kali | 24.000,00 | 0 % | Rp. 6.000.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 262.500.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 262.500.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | | Rp. 262.500.000,00 |
| | [#] Jasa Penyampaian SPPT PBB ke Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 262.500.000,00 |
| | [-] Jasa Penyampaian SPPT PBB ke Masyarakat | | | | | Rp. 262.500.000,00 |
| | Jasa Penyampaian SPPT PBB ke Masyarakat Spesifikasi : SK Wali Kota Nomor 100.3.3.3/312/BAPENDA/2024 | 35000 | Lembar | 7.500,00 | 0 % | Rp. 262.500.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 68.070.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 68.070.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 68.070.000,00 |
| | [#] Kegiatan Penagihan Pajak Langsung kepada WP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 68.070.000,00 |
| | [-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | | Rp. 17.835.000,00 |
| | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian | 5 | Orang | 3.567.000,00 | 0 % | Rp. 17.835.000,00 |
| | [-] Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | | Rp. 50.235.000,00 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|--|-------------------|--------|---------------|-----|-------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian | 5 | Orang | 10.047.000,00 | 0 % | Rp. 50.235.000,00 |

Jumlah : **Rp. 372.596.040,00**

| | |
|--|---|
| | Kota Bontang..... Kepala Badan Pendapatan Daerah  SYAHRUDDIN, SE, M.A.M.Eng NIP. 197402102005021001 |
|--|---|

| | | |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah | | | | |
|----------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| | | | | |

Data Kosong

DUPLIKATE
BAPENDA

